

Fungsi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dalam Membentuk Ruang Publik

Oleh: Choirul Fajri, S.I.Kom, M.A
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan
(choirulfajri@yahoo.co.id/089671901055)

Abstrak

Lembaga penyiaran memiliki peran bagi terbentuknya ruang publik, yang dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi guna mengkritisi sebuah isu-isu sosial. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sebagai sebuah lembaga penyiaran televisi swasta pertama di Indonesia, tentu diharapkan juga memiliki fungsi untuk terciptanya ruang publik, akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis program-program di RCTI saat ini masih lebih banyak didominasi dengan program-program yang bersifat hiburan tanpa mengindahkan nilai-nilai edukasi. Program berita yang ada di RCTI juga belum mengarah pada terciptanya ruang publik, di mana hanya sebatas memberikan informasi semata tanpa adanya interaktivitas dengan masyarakat untuk ikut memberikan aspirasi/tanggapan terhadap pemberitaan tersebut. Kesadaran dari pemilik media untuk memproduksi program interaktif guna mendorong terciptanya ruang publik sangat diperlukan, namun masyarakat sendiri juga mempunyai andil bagi terciptanya ruang publik di media.

Kata Kunci: Ruang Publik, Lembaga Penyiaran, dan RCTI.

A. Latar Belakang

Ruang publik (public sphere) merupakan suatu tempat bagi publik untuk melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Adanya ruang publik berarti memberikan suatu kebebasan bagi masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sendiri tanpa harus takut dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi ataupun budaya. Sebagaimana diungkapkan oleh Habermas, ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu ruang publik merupakan suatu sarana di mana masyarakat bebas dalam menyatakan sikap dan argumen terhadap negara atau pemerintah. Adanya komunikasi masyarakat secara bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi dari pemerintah atau otonom di dalamnya adalah merupakan syarat terciptanya ruang publik yang ideal. (Habermas, 1989:16)

Televisi merupakan suatu media yang dapat digunakan sebagai sarana terhadap terbentuknya ruang publik, dengan adanya televisi masyarakat tentunya dapat menyalurkan aspirasi, gagasan, dan argumen-argumen mereka terhadap hal-hal politik ataupun isu-isu lainnya. Terbentuknya ruang publik di dalam media televisi tentu harus dibarengi dengan adanya kesadaran dari para aktor dalam media televisi itu sendiri, faktor kepemilikan (ownership) sangat berpengaruh dalam hal ini. Di dalam prakteknya selama ini banyak sekali kita jumpai stasiun-stasiun televisi yang menampilkan tayangan-tayangan yang tingkat kenetralitasannya sangat dipertanyakan, akibat adanya pengaruh dari pemegang

kekuasaan dalam hal ini adalah owner. Sering kali justru kita jumpai saat ini televisi justru dimanfaatkan oleh para owner untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Stasiun Televisi Rajawali Citra Indonesia (RCTI) yang merupakan stasiun televisi swasta tertua di Indonesia merupakan suatu contoh realitas media yang didominasi oleh kekuasaan kepemilikan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RCTI saat ini berada di bawah naungan Media Nusantara Citra (MNC) milik Harry Tanusoedibyo, sering kali kita jumpai menampilkan berita-berita yang terkait dengan sang owner tersebut, misalnya saja pemberitaan mengenai Partai Gerindra, yang kala itu Harry Tanusoedibyo dan Wiranto mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, pembatasan berita-berita mengenai Jokowi, dan dominasi berita mengenai Prabowo Subianto.

Kembali ke dalam konsep ruang publik tadi, media televisi dalam hal ini stasiun televisi Rajawali Citra Indonesia (RCTI) penulis melihat masih kurangnya fasilitas yang diberikan oleh RCTI dalam membentuk sebuah ruang publik. Hal ini terbukti dengan minimnya program-program di RCTI yang memfasilitasi adanya suatu forum diskusi masyarakat dalam ikut memberikan gagasan ataupun ide-ide mereka terhadap suatu isu tertentu. Selama ini program-program di RCTI justru cenderung lebih mengutamakan nilai-nilai hiburan semata. Di waktu-waktu prime time, program di stasiun televisi RCTI justru diisi dengan sinetron-sinetron, reality show, variety show maupun infotainment.

Untuk itulah dalam paper ini, penulis akan mencoba mengkaji tentang bagaimana seharusnya RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama yang perolehan ratingnya cukup tinggi untuk memiliki fungsi bagi terciptanya ruang publik.

B. Pembahasan

Melihat sejarah terbentuknya stasiun televisi Rajawali Citra Indonesia (RCTI) adalah merupakan stasiun televisi pertama di Indonesia. RCTI pertama mengudara pada tanggal 13 November 1988 dan diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1989. Pada saat itu siaran RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder dan membayar iuran setiap bulannya. RCTI melepaskan dekodernya pada akhir 1989, pemerintah Indonesia sendiri memberikan kebebasan pada RCTI untuk melakukan siaran bebas secara nasional sejak tahun 1990 tetapi pada akhirnya baru terwujud pada akhir 1991 setelah membuat RCTI Bandung pada 01 Mei 1991. Pada tahun 2004 RCTI termasuk stasiun televisi terbesar di Indonesia, sejak tahun 2003 RCTI dimiliki oleh Media Nusantara Citra yang merupakan kelompok perusahaan media yang juga memiliki Global TV dan TPI yang saat ini telah berubah nama menjadi MNC TV. Dengan memiliki motto Kebanggaan Bersama Milik Bangsa, saat ini RCTI telah berkembang pesat dibandingkan saat berdirinya di tahun 1989 lalu.

RCTI sebagai media televisi tentunya dituntut untuk memainkan peranannya sebagai sarana bagi perkembangan suatu bangsa. Salah satu peranan yang harus dibentuk oleh RCTI adalah terciptanya ruang publik, sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa ruang publik merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasinya, diskusi, bertukar pendapat, memberikan gagasan ataupun pemikiran terhadap isu-isu politik dan lainnya. Adanya ruang publik, paling tidak diharapkan memiliki fungsi

Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

sebagai fungsi demokrasi. Makna penting dalam pembentukan demokrasi dalam ruang publik dalam terletak dalam konsepsinya tentang proses diskursus yang dapat terbentuk melalui perdebatan-perdebatan yang rasional dan kritis, setara dan terbuka.

Proses komunikasi masyarakat adalah sebuah prinsip demokrasi yang tidak hanya mengandalkan semua orang untuk berbicara dengan kesempatan yang sama tentang persoalan-persoalan pribadinya, keinginan dan keyakinannya, proses komunikasi yang otentik hanya dapat dicapai dalam kerangka bahwa semua pendapat pribadi ataupun kelompok dapat berkembang di dalam debat rasional dan kritis dan kemudian membentuk sebuah opini publik. Individu-individu diharapkan mampu komunikatif untuk membangun ruang publik. Individu diharapkan mampu mengekspresikan sikap bukan dengan kekerasan dan emosional melainkan melalui argumen. Dengan demikian nantinya kritik etis pada ruang publik akan terjadi karena individu-individu yang ada di dalamnya saling berargumen dan mengungkapkan sikap secara rasional.

Selanjutnya, ruang publik diharapkan memiliki fungsi sebagai mediator. Habermas berpendapat bahwa ruang publik merupakan mediator antara kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi individu, dengan tuntutan-tuntutan dan kepentingan publik, termasuk di dalamnya menjadi mediator antara kepentingan dan opini pribadi dengan kepentingan dan opini publik demi mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mewujudkan konsensus komunal. Fungsi ini secara empirik dapat dijalankan oleh media televisi sendiri, karena televisi merupakan suatu media bagi masyarakat untuk menjembatani antara kebutuhan-kebutuhan individu dengan kebutuhan publik. Melalui televisi, masyarakat dapat menyalurkan gagasan, ide-idenya untuk membangun suatu kebutuhan publik yang dapat dimanfaatkan bersama.

Fungsi terakhir dari ruang publik adalah sebagai perekat sosial. Ruang publik yang hidup dan sehat akan mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Melalui televisi pula fungsi ruang publik ini dapat dimungkinkan, dengan forum-forum talkshow yang ditayangkan pada suatu stasiun televisi masyarakat bisa bertemu dengan orang-orang penting baik semisal para pejabat pemerintah. Tentu hubungan erat antara masyarakat awam dengan para elit politik dapat terbentuk di dalam talkshow ataupun diskusi tersebut. Akan tetapi memang pada prakteknya saat ini, masih sedikit sekali stasiun televisi yang menyelenggarakan program-program talkshow politik. Acara-acara talkshow politik sering kali dikalahkan oleh acara-acara hiburan ataupun acara lain yang memperoleh rating cukup tinggi. Sehingga fungsi ruang publik untuk dapat mempererat hubungan sosial ini, saat ini nampaknya sudah tidak dimungkinkan lagi. (Ambarwati, 2005)

Televisi sebagai sarana terciptanya ruang publik, setidaknya stasiun televisi termasuk dalam hal ini adalah RCTI diharapkan mampu memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Hal ini sebagaimana karakteristik dari ruang publik sendiri. Ada dua hal yang menjadi karakteristik ruang publik, yang pertama ruang publik merujuk pada komunikasi dalam makna luas. Tempat-tempat yang menyediakan sarana untuk bertukar informasi berarti termasuk dalam kriteria ini, misalnya saja warung makan, kopi dan lainnya. Media cetak dan elektronik, seperti: televisi, radio, dan internet juga dapat dikatakan menjadi bagian dari kriteria tersebut. Publik dalam kata ruang publik setidaknya mempunyai dua arti, yakni; semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya, tanpa memandang perbedaan apapun, baik perbedaan etnis, agama, jenis

kelamin, status ekonomi maupun perbedaan-perbedaan lainnya dan tempat berlangsungnya diskusi serta pengambilan kebijakan publik tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat secara nyata karena sebuah diskusi tidak boleh berlangsung di tempat yang bersembunyi. (Ambarwati: 2005)

Dari hal di atas, jelasnya bahwa suatu ruang publik membutuhkan adanya keterbukaan informasi untuk masyarakat dapat bertukar pikiran dan memberikan pendapat mereka. Televisi jelas memungkinkan hal ini, melalui program-program yang ditayangkan, masyarakat tentu dapat berperan aktif dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi ini. Akan tetapi terciptanya suatu ruang publik di televisi, tentu harus adanya kesadaran dari pemerintah untuk memberikan kebebasan televisi untuk mengakses dan menayangkan program-program televisi yang bersifat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan isu-isu lainnya. Sering kali masalah kebebasan pers/media ini berbenturan dengan terciptanya ruang publik itu sendiri. Di Indonesia sendiri, saat ini menurut kami pemerintah telah memberikan fasilitas berupa kebebasan pers/media tersebut.

Jika dahulu media yang ada di Indonesia seolah hanya sebagai alat pemerintah akan tetapi dalam perkembangannya kondisi tersebut telah berubah menjadi suatu ruang publik. Pada masa orde baru (pemerintahan Soeharto) adanya kontrol yang kuat terhadap kebebasan media sangatlah tinggi. Dalam masa itu, presiden Soeharto telah memberikan garis tebal bagi TVRI dengan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa “lembaga penyiaran milik pemerintah yaitu TVRI dan RRI secara resmi ditugaskan untuk memproduksi berita dan menjalankan jurnalisme penyiaran yang terbatas hanya untuk kepentingan propaganda pemerintah. Dengan demikian, jelas bahwa selama masa orde baru monopoli pemerintah terhadap stasiun televisi sangatlah kuat. (Budiman, 2000:21)

Seiring dengan runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan munculnya masa reformasi, kondisi media di Indonesia mengalami perubahan yang radikal. (Kitley, 2002:34) Sampai dengan saat ini kebebasan media/pers telah berkembang pesat dan dengan adanya perturan baru mengenai media telah menghapuskan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Undang-Undang Pers yang tentu saja membuka jalan bagi kemunculan pers tanpa adanya suatu izin dari penerbitan. Hal ini jelas menunjukkan adanya suatu kebebasan bagi setiap aktor-aktor yang berada dalam media/pers saat ini dapat mengekspresikan dan mengendalikan sendiri konten-konten/program-program yang ada di dalam suatu media tanpa adanya kekhawatiran akan kekuatan elit-elit politik kembali.

Berkaitan dengan adanya kebebasan pers/media tersebut, tentu saja menjadikan televisi saat ini dapat menampilkan program-program yang sesuai dengan keinginannya sendiri dan nantinya dapat memiliki fungsi-fungsi sebagai ruang publik. Akan tetapi fungsi ruang publik, hanya dapat terjadi apabila adanya tempat yang diberikan stasiun televisi untuk terciptanya suatu ruang publik itu sendiri. RCTI sendiri sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia masih sangat minim dalam memfasilitasi terbentuknya ruang publik. Berdasarkan pengamatan penulis, hal ini tercermin dengan terbatasnya acara diskusi yang ditayangkan oleh RCTI sendiri yang nantinya memungkinkan terselenggaranya diskusi publik yang rasional dan kritis. Padahal ruang publik yang dapat terjadi apabila adanya diskusi yang kritis dan rasional yang melibatkan publik sendiri serta masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik.

RCTI sebagai sebuah institusi masih belum menempatkan kepentingan publik sebagai sebuah prioritas yang disebabkan karena adanya motif-motif ekonomi. Selain itu adanya suatu liberalisasi dalam industri media seolah mengharuskan media-media tak terkecuali televisi sepertinya dituntut untuk memenuhi selera konsumen dan para pengiklan daripada mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik sendiri.

Hal tersebut, dapat dilihat dari tayangan-tayangan televisi sendiri yang saat ini lebih banyak menayangkan tayangan-tayangan yang berbau hiburan hanya sekedar untuk mendapatkan rating yang cukup tinggi. Demikian halnya di RCTI sendiri, apabila kita amati sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada program-program di RCTI yang menayangkan suatu program untuk dapat terbentuknya ruang publik.

Sebagai salah satu sarana terciptanya ruang publik, RCTI diharapkan mampu menjembatani kebutuhan-kebutuhan publik tanpa dikonstruksi dengan dominasi politik, ekonomi maupun sosial. RCTI tentunya harus memaksimalkan kinerja bagi terciptanya ruang publik yang ideal. Akan tetapi, menjadi pertanyaan besar disini adalah apakah RCTI sebagai salah satu stasiun televisi cukup efektif terhadap terciptanya suatu ruang publik? Tentu masih banyak orang yang mempersanyakannya. Jika dibandingkan dengan media cetak dalam hal pemberitaan televisi kurang mendalam hal ini mungkin terjadi karena sifat dari jurnalisme penyiaran yang cenderung singkat dan tidak mendalam karena keterbatasan waktu. Meskipun media cetak seperti surat kabar dapat menyajikan banyak berita, akan tetapi kebanyakan para pembaca biasanya hanya memperhatikan terhadap isi-isi berita yang mencolok saja dan tidak semua berita dibaca. Dengan demikian, menyebabkan televisi tetap dianggap mempunyai peran penting dalam terbentuknya ruang publik yakni sebagai suatu sarana penyebaran informasi dan menciptakan arena debat bagi publik. (Lynch, 2000:92)

Program-program televisi seperti siaran berita, talkshow adalah beberapa program di televisi yang mampu melaksanakan peran tersebut. Program berita adalah salah satu bukti bahwa stasiun televisi mempunyai peranan dalam proses penyebaran berita. Sementara program-program seperti talkshow mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber informasi dan arena debat publik. Di RCTI sendiri, meskipun telah adanya program-program berita, seperti: Seputar Indonesia, Sergap, Buletin Siang akan tetapi sejauh pengamatan penulis masih belum adanya program-program yang mampu mendatangkan debat publik namun hanya sebatas pada penyebaran informasi.

Untuk itulah, sepatutnya RCTI diharapkan dapat membuat suatu program-program talkshow yang memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut memberikan suatu argumen, pendapat, ide ataupun gagasan mengenai isu-isu politik dan lainnya. Dengan adanya program talkshow nantinya dapat digunakan pula sebagai wadah para politis untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Sementara bagi masyarakat, program talkshow dibutuhkan sebagai sebuah akses terhadap informasi dan sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui pilihan-pilihan politik mereka. Hal ini merupakan hakekat sebuah media yang memang harus dilaksanakan oleh aktor-aktor yang berada di dalam media dalm hal ini adalah televisi, karena media merupakan suatu sistem sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi menyediakan saluran komunikasi dari para pelaku di dalamnya.

RCTI sebagai sarana untuk membangun terciptanya ruang publik memang dibutuhkan adanya kesadaran pada internal RCTI sendiri untuk dapat membuat program-program yang memungkinkan adanya ruang publik. Selain itu masyarakat luar juga diharapkan terus memberikan dorongan bagi RCTI, terhadap program-program yang ditayangkan. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjadikan RCTI sebagai sarana bagi terbentuknya suatu ruang publik saat ini sudah mulai muncul, masyarakat tidak hanya berperan sebagai khlayak pasif saja yang menerima mentah-mentah terhadap apa yang menjadi program di RCTI namun masyarakat harus berperan sebagai khlayak aktif yang mampu mengkritisi program-program yang ditayangkan tersebut.

Adanya keaktifan masyarakat dalam memberikan filterisasi terhadap program yang tidak memberikan peluang bagi terbentuknya ruang publik tersebut, pernah terjadi yakni dengan adanya protes keras dari sekelompok masyarakat yang bernama Remotivi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memantau tayangan Jodohku di RCTI pada tanggal 20 Mei 2012 lalu. Program tersebut dikemas dalam waktu kurang lebih 3,5 jam yang menampilkan pesta pernikahan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanti.

Tayangan pernikahan Anang dan Ashanti tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemanfaatan frekuensi radio sebagai sarana ruang publik yang merupakan sumber daya alam terbatas yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Televisi sebagai ruang publik dianggap tidak sepatutnya menampilkan kegiatan yang sifatnya pribadi seperti pernikahan kedua selebritis tersebut. Pernikahan Anang Ashanti dianggap tidak memiliki kaitan ataupun manfaat bagi kepentingan publik di masa depan.

Pihak Remotivi pada saat itu menyatakan bahwa RCTI hendaknya menyiarkan program-program televisi yang berguna bagi publik. Banyak hal yang lebih berguna untuk ditayangkan daripada sebatas pesta pernikahan kedua selebritis tersebut. Misalnya saja program investigasi mendalam mengenai kasus korupsi yang nantinya memungkinkan adanya komunikasi/dialog dengan para audiens baik secara langsung ataupun sms atau email, kasus-kasus kesehatan (semisal, gizi buruk) dan inspirasional yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih maju dan berfikir kritis. Televisi merupakan media yang vital dalam mengawal dan membentuk situasi sosial politik budaya suatu masyarakat. Untuk itulah diharapkan stasiun televisi RCTI pada khususnya dan stasiun televisi lainnya pada umumnya untuk lebih berpihak bagi kepentingan publik. Apapun yang menjadi kebutuhan publik hendaknya dapat diprioritaskan oleh para stasiun televisi tidak hanya RCTI semata. (<http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/21/siaran-pernikahan-anang-dinilai-tak-mendidik>, 30 Februari 2015)

Tidak hanya itu saja, apabila diamati di RCTI kerap kali menayangkan acara-acara pribadi yang kemudian dimonopoli menjadi sebuah acara untuk dikomersilkan. Misalnya saja pada bulan September 2013 di mana RCTI menayangkan acara pertunangan antara pedangdut Zaskia Gotik dengan Vicky Prasetyo, ataupun acara-acara lainnya, seperti: acara ulang tahun putra musisi Ahmad Dhani, yakni Abdul Kadir Jaelani pada akhir bulan Agustus 2014 lalu dan kemudian Al Ghazali putra pertamanya pada 01 September 2014 lalu, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 17 Oktober 2014 lalu, dan disusul Acara Ngunduh Mantunya pada tanggal 30 Desember, selain itu juga ada acara kelahiran Anak Ashanti dan Anang Hermansyah yang ditayangkan juga secara live pada tanggal 14 Desember 2014 lalu. Tayangan-tayangan seperti ini tentunya menjadi sebuah kontradiksi

Diterbitkan oleh Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

bagi sebuah lembaga penyiaran yang semestinya dapat dimanfaatkan bagi terbentuknya ruang publik, akan tetapi justru hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bersifat profit oriented semata. Namun anehnya acara-acara seperti itu, di Indonesia justru mampu memperoleh rating tinggi dibandingkan dengan acara-acara talkshow politik ataupun dialog masyarakat. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan media termasuk RCTI justru lebih sering menayangkan program-program yang bersifat entertainer semata tanpa adanya nilai-nilai edukasi di dalamnya. Sebagai sebuah lembaga penyiaran RCTI seharusnya mampu mementingkan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan privat yang lebih bersifat komersil belaka, di mana kemudian dapat berfungsi sebagai sarana untuk terciptanya ruang publik. Adanya ruang publik di media tersebut, di mana nantinya mampu memberikan kontribusi berupa kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, ataupun isu-isu sosial lainnya. Akan tetapi dalam prakteknya, dominasi akan kepentingan privat untuk memonopoli program-program yang ada di RCTI lebih sering sekali kita jumpai, hal ini menyebabkan fungsi RCTI sebagai sarana terbentuknya ruang publik masih belum dapat dimaksimalkan.

Masyarakat sendiri mempunyai peranan dalam hal ini, di mana kesadaran masyarakat kita untuk mengontrol media sebagai sebuah lembaga penyiaran masih sangat rendah. Jika di negara-negara seperti Amerika maupun Eropa, masyarakatnya sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar terciptanya ruang publik di media bahkan sampai membeli time and space untuk terciptanya sebuah program yang interaktif, maka sesungguhnya inilah yang perlu dilakukan pula oleh masyarakat kita.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

- a. RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama dan merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, masih belum bisa memaksimalkan fungsinya sebagai sarana untuk terbentuknya ruang publik. Hal ini dapat dilihat dari program-program RCTI yang justru lebih banyak menayangkan program-program dengan mengedapankan hiburan semata. Misalnya saja: sinetron, variety show, music, infotainment, film televisi dan lain sebagainya.
- b. Program berita yang ada di RCTI misalnya saja Seputar Indonesia, dalam prakteknya hanya sebatas memberikan informasi saja kepada masyarakat tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam program tersebut guna terciptanya ruang publik melalui pertukaran informasi, gagasan, ide ataupun diskusi kritis mengenai isu-isu politik dan lainnya. Sebagai sarana terbentuknya ruang publik, RCTI seharusnya memperbanyak program-program talkshow yang memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat dan elit politik untuk melakukan diskusi-diskusi kritis dan pertukaran informasi tanpa adanya kekhawatiran akan kekuatan-kekuatan politik ataupun ekonomi.
- c. Diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk ikut memonitoring program-program yang ada di RCTI guna terciptanya suatu ruang publik. Selama ini masyarakat Indonesia masih terkesan acuh dan menerima terhadap program-program yang ditayangkan di RCTI. Jika di luar negeri adanya kesadaran

masyarakat untuk menjadikan televisi sebagai ruang publik sangat tinggi, bahkan sampai rela membayar suatu stasiun televisi agar menampilkan program-program yang berfungsi sebagai ruang publik maka masyarakat Indonesia sepatutnya mampu meningkatkan kesadaran ini.

Referensi

Pustaka:

- Ambarwati. (2005.) *Televisi dan Ruang Publik: Kajian Kritis Terhadap RCTI sebagai Ruang Publik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budiman, Andy. (2000). *Indonesia's Broadcasting of Today*. Jakarta: _____
- Habermas, Jurgen. (1989). *Ruang Publik: Sebagai Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis-Edisi Terjemahan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kitley, Philip. (2002). *Televisi Bangsa Baru: Television, Reformasi and Renewal in Indonesia*. Australia: _____
- Lynch, G, Patrick. (2000). *A Little Knowledge is a Dangerous Thing: What We Know about the Role of the Media in State Politics*, Perspectives on Political Science.
- Internet: <http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/05/21/siaran-pernikahan-anang-dinilai-tak-mendidik>